

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik kartel mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ciri ini, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif¹.

Jadi sejak masa reformasi tersebut, partai-partai di Indonesia telah mengalami perubahan secara ideologi kepartaian, hal ini dikarenakan telah hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu koalisi. Penegasan ideologi dalam tubuh partai politik sebagai identitas fundamental yang menjadi ciri khas gerakan dan tujuan serta nafas perjuangan seolah telah terkikis oleh orientasi kepentingan kekuasaan semata, maksudnya berbagai perbedaan ideologi diantara partai-partai tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dalam proses kompetisi karena yang menjadi prioritas partai adalah peluang perolehan kursi kekuasaan sebanyak-banyaknya. Pola ini mulai terjadi pada pemilu 2004, dimana Kabinet Indonesia Bersatu mengakomodasi partai-partai Islam dan Sekuler sehingga semuanya masuk dalam kekuatan kabinet, yang pada awalnya memiliki jurang pemisah tetapi di akhir pemilihan menjadi suatu kekuatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Penelitian terkait politik kartel di Indonesia pun sebelumnya pernah diteliti oleh ilmuwan politik yakni Kuskridho Ambardi dalam bukunya, melalui berbagai fakta, Ambardi mengungkapkan bahwa telah terjadi kartel politik, khususnya pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri

¹ Kuskridho Ambardi. *Menungkap Politik Kartel* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2009), hlm. 3

(2001-2004) dan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009), berbagai kebijakan serta penyusunan undang-undang di eksekutif dan legislatif dibuat dalam kerangka kepentingan kartel. Kondisi seperti ini pun terus berlanjut di Indonesia sampai sekarang, partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan komitmen ideologi dan programnya agar tetap bertahan sebagai sebuah kelompok sehingga partai seperti tidak memiliki identitas atau ciri khas partainya.

Fenomena politik kartel tersebut terjadi dalam Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2017. Dalam kontestasi tersebut, sejumlah nama calon walikota dan wakil walikota bermunculan, mulai dari petahana yang didukung banyak partai, dan juga terdapat nama-nama baru yang ikut berpartisipasi mencalonkan diri di pilkada tersebut. Terdapat 3 pasang calon yang ikut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Kota Tasikmalaya yakni nomor urut 1 pasangan Dicky Chandra dan Denny Romdonny, nomor urut 2 pasangan Budi Budiman dan Muhammad Yusuf, dan nomor urut 3 pasangan Dede Sudrajat dan Asep Hidayat Surdjo.

Namun, seperti diketahui bersama bahwa tingkat popularitas, aksesibilitas, dan elektabilitas Budi Budiman sejak pilkada tahun 2012 silam hampir selalu berada di puncak. Persentase tinggi tersebut terus berlanjut hingga pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya tahun 2017, dengan hal tersebut maka bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Budi Budiman di pilkada 2017 tersebut. Namun, sejumlah keuntungan Budi Budiman nampaknya menimbulkan masalah baru. Masalah tersebut yakni sikap pragmatis sebagian besar partai politik yang cenderung main aman, dengan enggan berkompetisi melawan sosok petahana seperti Budi Budiman. Partai-partai politik cenderung melakukan koalisi pragmatis sendiri dengan tidak memerdulikan latar belakang ideologi tiap partai, serta mendukung satu nama yang tidak lain adalah petahana, tanpa melahirkan kandidat lain dari kader masing-masing partai hasil didikannya sendiri.

Seperti contohnya pada koalisi partai-partai pengusung Budi – Yusuf dalam pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017, yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi pengusung Budi – Yusuf ini merupakan contoh nyata dari politik kartel karena berdasarkan formasi koalisi pragmatis tersebut, dapat dilihat bahwa dalam mengusung Budi Budiman

yang notabnya punya banyak keuntungan politis dan materil, garis ideologi partai kian dikesampingkan. Pola koalisi yang dibentuk adalah dengan memerhitungkan potensi kemenangan kandidat dan berharap dapat berbagi jatah kursi kekuasaan.

Menurut Bapak Zenzen ², pada awalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengusung satu paket (calon walikota dan calon wakil walikota) karena ketika itu PPP memiliki 10 kursi di parlemen yang sudah mencukupi ambang batas penentu parlemen, karena pada aturannya harus memenuhi minimal 9 Kursi. Namun ada regulasi yang berbeda atau bisa dibilang berubah dipemilu 2017 ini, keputusan pemaketan pengusung itu ialah keputusan Dewan Partai Pusat (DPP), sedangkan Dewan Partai Cabang (DPC) tingkat Kota hanya bersifat rekomendasi, berbeda dengan pemilu tahun 2012, dimana pada tahun tersebut keputusan pemaketan pengusung itu diputuskan oleh Dewan Partai Cabang (DPC) tingkat kota dan Dewan Partai Pusat (DPP) hanya melayangkan rekomendasi. Sehingga pada saat itu PPP melakukan komunikasi dengan partai-partai lain yang mempunyai paham-paham yang sama dan bisa berkoalisi dengan PPP. Setelah melakukan kajian mendalam, PPP akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan tiga partai lain yaitu Golkar, PKB, Nasdem karena ada kesepakatan dengan partai-partai tersebut. PPP itu sendiri mengusung calon yaitu petahana Budi Budiman, yang merupakan kader dari PPP yang dianggap berhasil sebagai wali Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya karena mempunyai progres yang jelas di dalam

² Bapak Zenzen adalah Ketua Tim Kemenangan Budi – Yusuf dari DPC PPP Kota Tasikmalaya

berbagai bidang, misalnya pendapatan daerah, pembertantasan masyarakat miskin, dan peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastuktur kota. Maka dari itu PPP mengusung Budi Budiman pada periode yang ke-2 karena dirasa layak diusung kembali.

Sebelum sepakat untuk berkoalisi, partai-partai yang akan berkoalisi tersebut melakukan bermacam-macam survei, kajian dan juga pengumpulan data otentik seperti BAPPEDA dan juga KPU. Survei yang mereka lakukan antara lain: pada tingkat popularitas, menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepopuleran Budi Budiman sebagai walikota di periode pertama mencapai 99% sehingga ini dipakai untuk menjadi salah satu acuan untuk berkoalisi, pada tingkat akseptabilitas, menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa ternyata kepuasan masyarakat terhadap periode pertama itu mencapai lebih dari 70%, dan pada tingkat elektabilitas, keterpilihan Budi Budiman sebagai walikota sebelumnya itu mencapai 60%. Dari data ini lah keempat partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan koalisi dan sepakat untuk memilih satu calon walikota periode 2017-2022 yaitu Budi Budiman dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan menunjuk Muhammad Yusuf dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai wakilnya.

Setelah di akumulasikan, jumlah kursi yang didapatkan dari gabungan koalisi ke empat partai tersebut adalah 18 kursi di Parlemen, dengan perhitungan 10 kursi dari Partai Persatuan Pembangun (PPP), 5 kursi dari Partai Golongan Karya (Golkar), 2 Kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan 1 Kursi dari Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem). Walaupun partai-partai yang bekoalisi tersebut mengesampingkan idelogi partai mereka atau bisa dikatakan menghilangkan identitas partai masing-masing, mereka tetap melakukan koalisi demi eksistensi dan tujuan atau kepentingan partainya masing-masing. Dan oleh karena itu keempat partai ini (PPP, Golkar dan PKB, Nasdem) setuju untuk melakukan koalisi dengan

menyatukan tujuan dan maksud yang sama, yaitu memenangi pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017.

Sesuai fakta dan data yang diperoleh sementara serta telah dijelaskan secara umum, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena politik kartel pada level daerah khususnya dalam kontestasi pemilihan walikota Tasikmalaya 2017. Urgensi dari penelitian ini adalah karena dalam tataran implementasi di lapangan didapatkan hal yang menarik yaitu tarik ulur kepentingan pragmatis partai pengusung koalisi Budi – Yusuf di pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017. Hal tersebut, merupakan degradasi ideologi partai politik karena lebih memprioritaskan kepentingan pragmatis dibandingkan nilai-nilai perjuangan serta basis partai yang seharusnya dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten. Lalu, belum adanya penelitian mengenai politik kartel partai di tingkat daerah khususnya di Kota Tasikmalaya, menjadi tantangan tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis selanjutnya akan mencoba melakukan penelitian dengan judul “Politik Kartel (Studi Pada Koalisi Partai Pengusung Budi – Yusuf dalam Pilkada 2017)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana politik kartel yang terjadi pada koalisi partai pengusung Budi Yusuf dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penulis ini memiliki tujuan penelitian: untuk mengetahui bagaimana fenomena politik kartel yang terjadi dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017 khususnya pada koalisi partai pengusung Budi – Yusuf.

D. Pembatasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah agar pembahasan tidak meluas dan lebih terarah yaitu pada konteks politik kartel dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017 khususnya pada koalisi partai pengusung Budi-Yusuf.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat, bahwa politik kartel telah memasuki level lokal daerah dan akan merusak hakikat demokrasi serta merugikan banyak pihak terutama masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai perbendaharaan tambahan ilmu politik dalam hal perkembangan konsep politik kartel dalam di tingkat lokal daerah dan bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan tentang bahayanya politik kartel pada level lokal daerah, yang mengakibatkan kebijakan publik bersumber dari hasil kolusi elit partai dan hampir tanpa oposisi, juga mengeliminasi peran rakyat secara umum.